

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan data di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa hipotesis penulis terbukti dalam penelitian ini. Di mana motivasi Indonesia dan Korea Selatan menggunakan pendekatan *treat perception* pada saat terjadinya pergeseran geopolitik ke Asia-Pasifik yakni karena adanya hubungan ketegangan antara Amerika dan China menyebabkan jalur tersebut dianggap tidak aman. Sehingga menjadikan Asia-Pasifik sebagai pintu masuk baru khususnya di Laut China Selatan. Dari kondisi geopolitik tersebut, dapat berdampak pada banyak kepentingan asing yang seringkali bertentangan dengan kepentingan negara yang ada di kawasan. Khususnya Korea Selatan dan Indonesia yang diakui kedua negara ini saling melengkapi. Indonesia mempunyai SDA yang beragam dan kaya, serta angkatan kerja dan potensi pasar yang besar. Maka, kekayaan sumber daya dan potensinya semakin ditingkatkan dengan teknologi tinggi, modal, dan keterampilan manajemen yang baik.

Melalui pendekatan ini, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia berharap diplomasi pertahanan yang dilakukan selalu berjalan dengan baik, dapat dibuktikan bahwa Korea Selatan adalah mitra diplomasi pertahanan yang paling aman untuk Indonesia, selain dari sisi keamanan dari bahaya ancaman Korea Selatan juga menawarkan sistem pendanaan yang murah dibanding negara lain maupun ancaman embargo, tentu hal ini sejalan dengan kepentingan bagi Indonesia. Contohnya yakni banyak ditemukan kunjungan-kunjungan kenegaraan maupun kunjungan kehormatan antara kedua negara yang intens setiap tahunnya dan memiliki dampak positif bagi kedua negara ini. Khususnya pertahanan dan mengutamakan stabilitas kawasan, serta yang paling penting adalah dalam menjalankan diplomasi pertahanan yang dilakukan pemerintah sudah mulai cenderung berpusat pada instrumen-instrumen damai.

Selain itu, ditutup dengan pola yang sesuai pada point pertama dari konsep diplomasi pertahanan yaitu *Defence Diplomacy for Confidence Building Measures*. CBM hal ini dilakukan untuk membangun hubungan baik antarnegara dan terutama

dilakukan untuk menyelesaikan kesalahpahaman antarnegara atau melalui saling keterbukaan dalam merumuskan kebijakan negara, saling transparan mengenai kapabilitas atau kapabilitas militer, sehingga apa yang dilaksanakan suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain. Pola pada poin pertama ini berhasil dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia melalui konsep ini dapat dilihat dan dinyatakan langsung oleh Presiden Moon Jae maupun Presiden Joko Widodo maupun dari pernyataan Menhan Prabowo yaitu dengan adanya keterbukaan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam keputusan negara, saling transparansi dalam kemampuan atau kapabilitas militer, maka hubungan kedua negara ini erat karena kedua negara ini tidak saling menganggap negara yang melakukan diplomasi pertahanan sebagai ancaman dan adanya rasa kepercayaan antara kedua negara ini.

## **4.2 Saran**

### **4.2.1 Bagi Pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

Secara umum, berbagai diplomasi pertahanan alutsista maritim Indonesia dengan Negara lain cukup berjalan dengan baik, namun terdapat saran bagi pihak-pihak di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yaitu Indonesia perlu lebih banyak lagi melakukan diplomasi pertahanan bidang pertahanan maritim dan banyak belajar dengan negara yang terbukti aman agar nantinya Indonesia dapat layak hingga harapannya dapat memenuhi standar alutsista pertahanan dan keamanan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian, dalam hal pembuatan kebijakan, segala penerapan kebijakan yang ada diperlukan persiapan matang dan fokus nyata pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin keberlanjutan rencana ini, yang harus didukung oleh kemauan para pemangku kepentingan. Persiapan tersebut juga mencakup sumber daya manusia dan data teknologi yang diinginkan industri pertahanan Indonesia dalam rangka mencapai kemandirian yang diperlukan.

Selain itu, setiap pihak yang ada diharapkan lebih memperhatikan dan mendukung pelaksanaan berbagai tugas khususnya dalam hal pencegahan ataupun penyimpangan dari diplomasi pertahanan yang sedang ataupun akan dilakukan. Tentu harus sesuai pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, berbunyi “untuk mendukung pelaksanaan fungsi Kelompok

Pertimbangan Kekeliruan pada saat membeli barang/jasa. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia akan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Pertahanan tentang organisasi dan tata kerja lembaga konsultan untuk mencegah kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertahanan dan TNI, dan hal-hal yang tidak diharapkan seperti korupsi dan sejenisnya tidak akan terjadi.

#### **4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Berdasarkan hasil yang telah didapat dari data tersaji, penelitian ini telah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan juga dapat berguna bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Meskipun, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam lagi terkait topik penelitian ini. Berikut saran-saran yang perlu diperhatikan peneliti selanjutnya yang mungkin tertarik meneliti topik Diplomasi Pertahanan Untuk Diplomasi pertahanan Alutsista Maritim sebagai berikut:

- Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih detail dan mendalam lagi terkait topik ini melalui referensi yang relevan, sehingga penelitian selanjutnya dapat memuat hasil yang lebih rinci dan lengkap
- Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mempersiapkan diri dan mempersiapkan data awal dalam proses pengambilan maupun pengumpulan data yang akan diteliti. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperbanyak data-data dengan sumber yang kompeten.